

Kerjasama dalam Pemanfaatan Ruang



Ir. Joko Widodo

"...100 tahun lalu, Solo menjadi kota yang paling bagus di Asia..."



- Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema *Sister City*
- Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus
- Kerjasama Pemanfaatan Ruang antar Daerah Berbasis Potensi Lokal
- Kajian Pustaka Keterkaitan Infrastruktur Publik dan Ekonomi
- Menuju Kota Bebas Kumuh
- Peluang Pengembangan Kota Rendah Karbon
- Menggagas Tata Ruang Perairan Berbasis Hak Nelayan
- Transformasi Menuju IAP 2.0
- Agenda BKPRN Mei - Juni 2010



dari redaksi.

sekapur sirih.



Salam hangat untuk pembaca Butaru..!

Tak terasa kini Buletin Tata Ruang telah sampai pada edisi ketiga di tahun 2010 ini. Jika sebelumnya buletin ini telah panjang lebar membahas tentang wilayah pesisir. Maka pada edisi ketiga ini Butaru mencoba mengangkat tema besar "Kerjasama dalam Pemanfaatan Ruang". Hal itu dikarenakan arti pentingnya sebuah kerjasama antara daerah/kota di dalam negeri, maupun kerjasama antara daerah/kota dalam negeri dengan daerah/kota yang ada diluar negeri.

Dalam topik utama edisi ketiga ini, redaksi mencoba mengangkat tema-tema seperti, pengelolaan perkotaan lewat skema *sister city*, mengenal kawasan ekonomi khusus, dan ada juga pembahasan kerjasama pemanfaatan ruang antar daerah berbasis potensi lokal. Selain membahas permasalahan yang memiliki relevansi dengan tema utama, maka pada rubrikasi topik lain, redaksi mencoba untuk menyuguhkan tema-tema yang menarik seperti bagaimana menciptakan tata ruang kota yang bebas kumuh, dan ada juga pembahasan bagaimana menciptakan tata ruang kota yang rendah karbon.

Sementara itu, untuk rubrik profil wilayah pada edisi ketiga ini, redaksi mencoba mengangkat Kota Solo yang sukses menata kota, dimana para Pedagang Kaki Lima (PKL) bersedia direlokasi untuk menempati kantong-kantong atau *shelter* bagi para PKL tanpa menimbulkan bentrokan, dan menjadikan Kota Solo masa depan merupakan Solo pada masa lampau.

Solo sebagai kota belakangan ini memang cukup menarik untuk diangkat dalam Buletin Tata Ruang, selain karena Kota Solo yang tengah sibuk berbenah menata ruang kota, namun juga dikarenakan tidak jauh dari sutradara dibalik keberhasilan Kota Solo, yaitu, Ir. Joko Widodo selaku Walikota Solo untuk periode 2010-2015 yang sekaligus sebagai pengisi rubrik Profil Tokoh yang berisi tentang pemikiran-pemikiran sekaligus impian pria yang disapa Jokowi dalam menciptakan karakter Kota Solo.

Disajikan oleh para penulis yang memiliki pengalaman yang panjang dibidangnya dan tema-tema yang menarik, menjadikan Butaru edisi ketiga ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan pengetahuan baru bagi pembacanya.

Akhir kata, kami redaksi mengucapkan selamat membaca...

Selamat membaca.

Redaksi

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan Buletin Tata Ruang edisi Mei - Juni 2010.

Tema yang diangkat dalam penerbitan kali ini adalah "Kerjasama dalam Pemanfaatan Ruang". Pilihan tema tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kerjasama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini sejalan dengan tuntutan yang kita hadapi saat ini, dimana sebuah daerah perlu melakukan kerjasama dengan daerah-daerah di sekitarnya dalam penyelenggaraan penataan ruang serta pengelolaan kawasan perbatasan, ekosistem, dan jaringan infrastruktur.

Saya meyakini bahwa kerjasama antarpemangku kepentingan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kerjasama, kita dapat menutup kelemahan yang ada dan memperkuat keunggulan yang telah dimiliki. Kerjasama juga dapat menghindarkan kita dari persaingan antardaerah yang tidak sehat, yang justru akan saling merugikan.

Secara khusus, saya menyambut baik dipilihnya Ir. Joko Widodo sebagai tokoh yang diulas profilnya. Keberhasilan beliau dalam menangani pedagang kaki lima dan merevitalisasi kawasan bersejarah di Kota Solo telah banyak diketahui, namun pemikiran di balik langkah tersebut patut kita gali lebih dalam.

Akhirnya saya ucapkan selamat menikmati Buletin Tata Ruang edisi Mei-Juni 2010 ini. Saya berharap artikel yang dimuat dalam edisi kali ini dapat menjadi inspirasi pembaca untuk lebih menyinergikan potensi yang ada untuk membuat ruang kehidupan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan umum
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana BKPRN

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc

daftar isi.

profil tokoh.

01 **Ir. Joko Widodo**
Walikota Surakarta
Oleh : Redaksi Butaru

profil wilayah.

06 **Solo Menuju Masa Depan Yang Bernuansa Masa Lalu**
Oleh : Redaksi Butaru

topik utama.

10 **Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema *Sister City***
Oleh : Andi Oetomo
Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung

14 **Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus**
Oleh : Ayu Prima Yesuari
Staf Ahli Muda Kawasan Ekonomi Khusus, Deputi V Kemenko Perekonomian

17 **Kerjasama Pemanfaatan Ruang antar Daerah Berbasis Potensi Lokal**
Oleh : Dr. Ir. Indrawati Fatimah, Dipl.Plan, MPst
Pengajar Jurusan Teknik Planologi, FALIL Universitas Trisakti

22 **Kajian Pustaka Keterkaitan Infrastruktur Publik dan Ekonomi**
Oleh : Ir. Putu Rudi Setiawan, MSc
Institut Teknologi 10 November, Surabaya

topik lain.

26 **Menuju Kota Bebas Kumuh**
Oleh : Lana Winayanti
Ketua Harian Seknas Habitat

31 **Peluang Pengembangan Kota Rendah Karbon**
Oleh : Laksmi Wijayanti
Kementerian Lingkungan Hidup

wacana.

34 **Menggagas Tata Ruang Perairan Berbasis Hak Nelayan**
Oleh : M. Riza Damanik
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

pengembangan profesi.

37 **Transformasi Menuju IAP 2.0**
Oleh : Elkana Catur. H
Pengurus Nasional IAP

40 **agenda kerja BKPRN.**

Pelindung : Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc., Dr. Ir. Max Pohan., Ir. Hermian Roosita., Drs. Syamsul Arif Rivai, M.Si, MM. | Penanggungjawab : Ir. Iman Soedradjat, MPM., Ir. Deddy Koespramoedyo, M.Sc., Ir. Heru Waluyo, M.Com., Drs. Sofjan Bakar, M.Sc., DR. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM. | Penasehat Redaksi : DR. Ir. Ruchyat Deni Dj, M.Eng., Ir. Iwan Taruna Isa, MURP., Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus (IT), Ir. Harry Djauhari, CES. | Pemimpin Redaksi : Ir. Maman Djumantri, M.Si | Wakil Pemimpin Redaksi : Ir. Soerono, MT | Redaktur Pelaksana : Agus Sutanto, ST, M.Sc. | Sekretaris Redaksi : Rahma Julianti, ST, M.Sc | Staf Redaksi : Ir. Nana Apriana, MT., Ir. Gunawan, MA., Hetty Debbie R, ST., Tessie Krisnaningtyas, SP., Dian Zuchraeni, ST., Listra Pramadwita, ST, MT, MSc., Ayu A. Asih, S.Si. | Koordinasi Produksi : Angger Hassanah, SH | Staf Produksi : Endang Artati, S.Sos | Koordinasi Sirkulasi : Supriyono, S.Sos | Staf Sirkulasi : Dhyan Purwaty, S.Kom., Alwirdan, BE | Penerbit : Sekretariat Tim Pelaksana BKPRN | Alamat Redaksi : Gedung G II, Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 | Telp. (021) 7226577 | Fax: (021) 7226577 | Website BKPRN : <http://www.bkprn.org> | Email : timpelaksanabkprn@yahoo.com dan redaksi_butaru@pu.go.id



Jalan Kota yang Disulap Menjadi Taman Kuliner, Gladag

Oleh : Dr. Ir. Endrawati Fatimah, Dipl.Plan, MPst
Pengajar Jurusan Teknik Planologi, FALTL
Universitas Trisakti

Makassar, salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah yang sukses



Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan sejak 2001, telah memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif memberikan peluang untuk daerah melakukan inovasi dan terobosan dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Tetapi kebijakan itu juga dipersepsikan sebagai momentum guna memenuhi keinginan dan mempercepat pembangunan di daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan negara.

Sementara dalam konteks kenegaraan muncul ego kedaerahan, sehingga dapat mempengaruhi disintegrasi bangsa akibat ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan daerah. Tentunya kondisi ini dipastikan akan terjadi mengingat setiap daerah memiliki potensi lokal yang berbeda. Hal itu juga mengisyaratkan tidak ada daerah yang mampu membangun daerahnya sendiri.

Modal lingkungan alam, lingkungan buatan, manusia, dan sosial, biasa disebut komunitas yang dimiliki daerah dapat dipandang sebagai potensi lokal jika kondisi modal tersebut memiliki nilai yang relative lebih baik, sehingga mampu mendukung pengembangan pembangunan dalam skala wilayah yang lebih luas. Kerjasama antar daerah salah satu alternatif untuk

menyalurkan potensi lokal daerah ke daerah lain yang memerlukan atau sebaliknya. Dengan kata lain, kerjasama antar daerah dapat dipandang sebagai upaya mengoptimalkan potensi masing-masing daerah.

Sedangkan di Indonesia berbagai bentuk kerjasama banyak dilakukan pemerintah daerah baik di level antar propinsi maupun kabupaten/kota. tetapi, jika diamati konsep kerjasama lebih kepada mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan umum dan kerjasama di sektor ekonomi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Pola yang terbentuk adalah satu daerah inti yang dianggap paling maju sebagai pusat penyediaan pelayanan umum dan daerah-daerah di sekitarnya yang berfungsi sebagai daerah pemanfaatan sumberdaya alam untuk produksi. Perkembangannya, daerah inti menjadi kawasan perkotaan yang makin besar, padat dan kaya, sementara daerah produktif makin rusak kualitas sumberdaya alamnya karena over eksploitasi. Pertanyaannya, apakah kerjasama tersebut telah terbukti berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau terhadap pelestarian lingkungan?

Secara jujur dapat dikatakan, saat ini eksploitasi sumberdaya alam justru makin parah, perubahan



Banjir dan longsor terjadi karena kerjasama pemanfaatan ruang yang tidak berjalan baik



Salah satu modal alam/sumber daya alam, pertambangan Batu Bara

lahan menjadi perkotaan makin pesat, kawasan pedesaan sebagai tonggak ketahanan pangan makin berkurang dan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya makin sering terjadi. Dari permasalahan itu, maka diperlukan konsep kerjasama pemanfaatan ruang antar daerah yang berbasis lokal agar kerjasama itu mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sementara, ruang itu sendiri adalah wadah sebagai

satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tetapi, kenyataannya penataan ruang hanya memandang ruang sebagai wadah untuk hidup (tempat tinggal) dan kegiatan sosial ekonomi. Guna mewujudkan struktur ruang dilakukan dengan cara menetapkan lokasi kegiatan seperti, pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana sarana beserta hirarki fungsionalnya. Upaya mewujudkan struktur ruang inilah yang kemudian memunculkan pola kerjasama antar daerah yang dilakukan saat ini yaitu kerjasama dalam hal pemanfaatan jaringan prasarana dan sarana.

Dalam hal mewujudkan pola ruang, ditetapkan berdasarkan kebutuhan ruang untuk penduduk dan kegiatan sosialnya. Penetapan peruntukan fungsi budidaya (selain untuk permukiman) didasarkan potensi pengembangan ekonomi daerah yaitu dengan melihat potensi sumberdaya alam yang ada serta potensi pasarnya. Sementara itu, penetapan peruntukan kawasan lindung didasarkan pada kriteria lokasi dan sesuai dengan ketentuan minimal yang ada. Upaya memelihara kehidupan hanya diartikulasikan dalam bentuk penetapan peruntukan ruang untuk fungsi lindung yang didasarkan kriteria kawasan lindung yang sifatnya sangat normatif. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan belum secara nyata dipertimbangkan.

Modal Komunitas Sebagai Penentu Potensi Lokal

Potensi lokal yang dimiliki suatu daerah dapat dinilai dari modal komunitas yang dimilikinya. Modal komunitas mencakup modal alam, modal lingkungan buatan, modal manusia dan sosial. Secara skematik modal komunitas dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Menurut Salim (2006), modal alam meliputi sumberdaya alam dan jasa ekosistem. Sementara dalam Hart, 2006, disebutkan bahwa modal alam meliputi :

- Sumberdaya alam yaitu semua yang diambil dari

alam dan digunakan dengan atau tanpa melalui proses produksi yang meliputi air, tanaman, hewan, dan material alam seperti bahan bakar fosil, logam dan mineral.

- Jasa ekosistem yaitu proses alami yang dibutuhkan bagi kehidupan seperti sumberdaya perikanan, lahan untuk budidaya, kemampuan asimilasi air dan udara dan sebagainya.
- Estetika dan keindahan alam yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup.

Sedangkan, modal manusia merupakan kemampuan setiap individu dalam hal ketrampilan, kesehatan fisik dan mental serta pendidikan yang mencerminkan kualitas jasmani-rohani. Sementara modal sosial adalah hubungan yang terjadi dalam suatu komunitas atau cara orang berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dalam satu komunitas (Salim, 2006 dan Hart, 2006). Modal sosial mencakup modal sosial sipil dan modal sosial pemerintah. Modal sosial sipil berwujud interaksi tingkat mikro rumah tangga/perusahaan yang dipengaruhi nilai kepercayaan, sikap dan norma kelakuan. Modal sosial pemerintahan berupa interaksi tingkat makro berkaitan dengan hukum, aturan, prosedur, *good governance* cerminan kredibilitas pemerintah

(Salim, 2006). Sementara, modal lingkungan buatan adalah modal hasil rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia termasuk infrastruktur jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, sistem pengolahan limbah cair, sistem pengolahan sampah, ruang terbuka, bangunan dan sebagainya.

Konsep pembangunan berkelanjutan *Concentric Rings* menunjukkan adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada ketersediaan sumberdaya lingkungan. Dengan konsep ini ditunjukkan bahwa sasaran akhir pembangunan adalah pembangunan sosial. Meskipun demikian, untuk mencapai keberlanjutan, pembangunan ekonomi dan sosial tidak boleh melampaui batas lingkaran lingkungan tersebut. Batas area yang terbentuk oleh lingkaran lingkungan tersebut dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah apa yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Dengan kata lain daya dukung lingkungan dalam konsep *concentric rings* dipandang sebagai pembatas perkembangan (Graymore, 2005; Hart, 2006; *Sustainable Development Communications Network*, 2008).

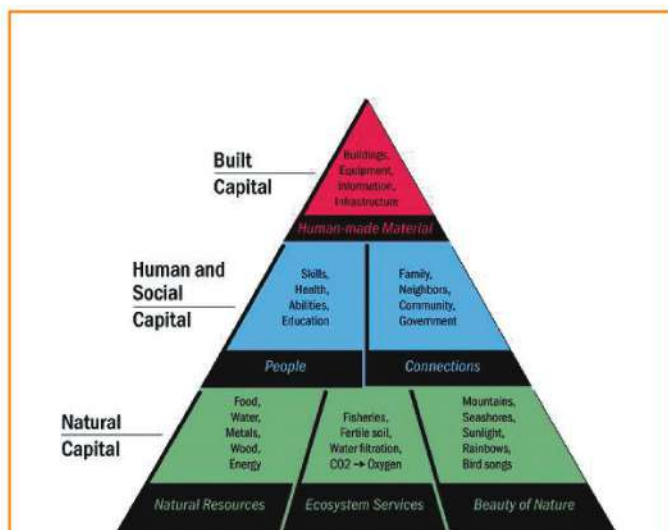
Pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan penghubung keterkaitan antara manusia dan lingkungan dan dapat dipandang sebagai wujud dari kemampuan manusia (*human ability*) untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketidaktepatan kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan akan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak sekaligus tidak memperoleh manfaat lingkungan bagi pembangunan sosial.

Penghitungan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah salah satunya dapat menggunakan metode pendekatan *supply* dan *demand*. *Supply* adalah kemampuan yang dimiliki untuk menyediakan sumberdaya, sementara *demand* adalah kebutuhan sumberdaya bagi kehidupan. Apabila *supply* lebih besar dari *demand* maka daya dukung lingkungan belum terlampaui, dengan kata lain sumberdaya tersebut merupakan potensi lokal, demikian sebaliknya.

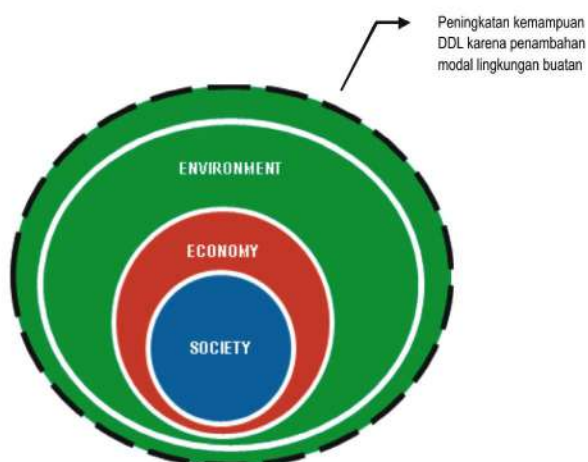
Konsep Kerjasama Pemanfaatan Ruang Antardaerah Berbasis Potensi Lokal

Sub-sub bab sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa potensi daerah dapat berupa modal alam, manusia dan sosial serta lingkungan buatan. Agar pembangunan berkelanjutan, daya dukung lingkungan merupakan pembatas perkembangan. Untuk mempertahankan keberlangsungan modal alam, maka modal alam merupakan titik tolak penetapan arah dan proses pembangunan yang akan dilakukan. Hingga saat ini, modal alam yang dianggap sebagai potensi lokal selalu yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses produksi barang seperti lahan yang subur, perikanan, hutan, pertambangan karena memiliki nilai ekonomi yang jelas.

Salah satu unsur alam yang tidak pernah dianggap potensi lokal adalah sumberdaya air, dimana zat ini sebagai sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Air juga menyediakan jasa ekologis karena memiliki kemampuan untuk mengasimilasi limbah cair yang tercampur ke dalamnya.



Gambar 1. Modal Komunitas (Sumber: Hart, 2006)



Gambar 2. Modifikasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Concentric Rings (Sumber: Fatimah, 2009)



DAS Berantas bagian hulu



DAS Berantas bagian hilir

Meskipun demikian, air dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Akibatnya, penggunaan air menjadi tidak bijaksana dan ketersediaan air secara kuantitas dan kualitas mulai menjadi masalah. Padahal, ketersediaannya harus tetap terjaga agar mampu mendukung kehidupan manusia.

Dalam PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah, objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Sementara itu, pengelolaan sumberdaya air menjadi objek kerjasama sesuai UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang dalam proses revisi) urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom antara lain meliputi: a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) pengendalian lingkungan hidup. Ketiga urusan wajib tersebut sangat terkait dengan upaya pengelolaan sumberdaya air.

Pengelolaan sumberdaya air tidak dapat dilakukan dalam batas administrasi, karena wilayah ekosistem tata air mengikuti geografis. Menurut Syarif, 1997, Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang secara fungsional sebagai suatu ekosistem kesatuan wilayah tata air.

Secara geografis, kota/kabupaten merupakan bagian dari satu atau bahkan beberapa DAS. Seperti juga dikatakan oleh Tambunan (2005), dimanapun kita berada di muka bumi ini, lokasi itu pasti merupakan bagian dari DAS. Ruang pada suatu DAS lebih tepat jika dipandang sebagai satu kesatuan geografis bukan terpisah oleh batasan administratif. Ekosistem DAS dapat menjadi pemersatu daerah karena setiap daerah didalamnya memiliki kepentingan yang sama terhadap keberlanjutannya.

Ekosistem DAS terbagi dalam DAS hulu, tengah dan hilir. Daerah hulu sungai dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut : merupakan daerah konservasi, kerapatan drainase lebih tinggi, daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%), bukan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi biasanya tegakan hutan.

Sementara DAS hilir dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut : merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan drainase lebih kecil, daerah dengan kemiringan lereng kurang dari 8%, pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan), pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan jenis vegetasi didominasi tanaman budidaya. Daerah aliran sungai bagian tengah merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik DAS tersebut di atas (Asdak, 2002).

Apapun pembangunan yang dilakukan akan merubah unsur-unsur alami pembentuk ekosistem DAS seperti topografi, vegetasi serta tata guna tanahnya. Ketidak

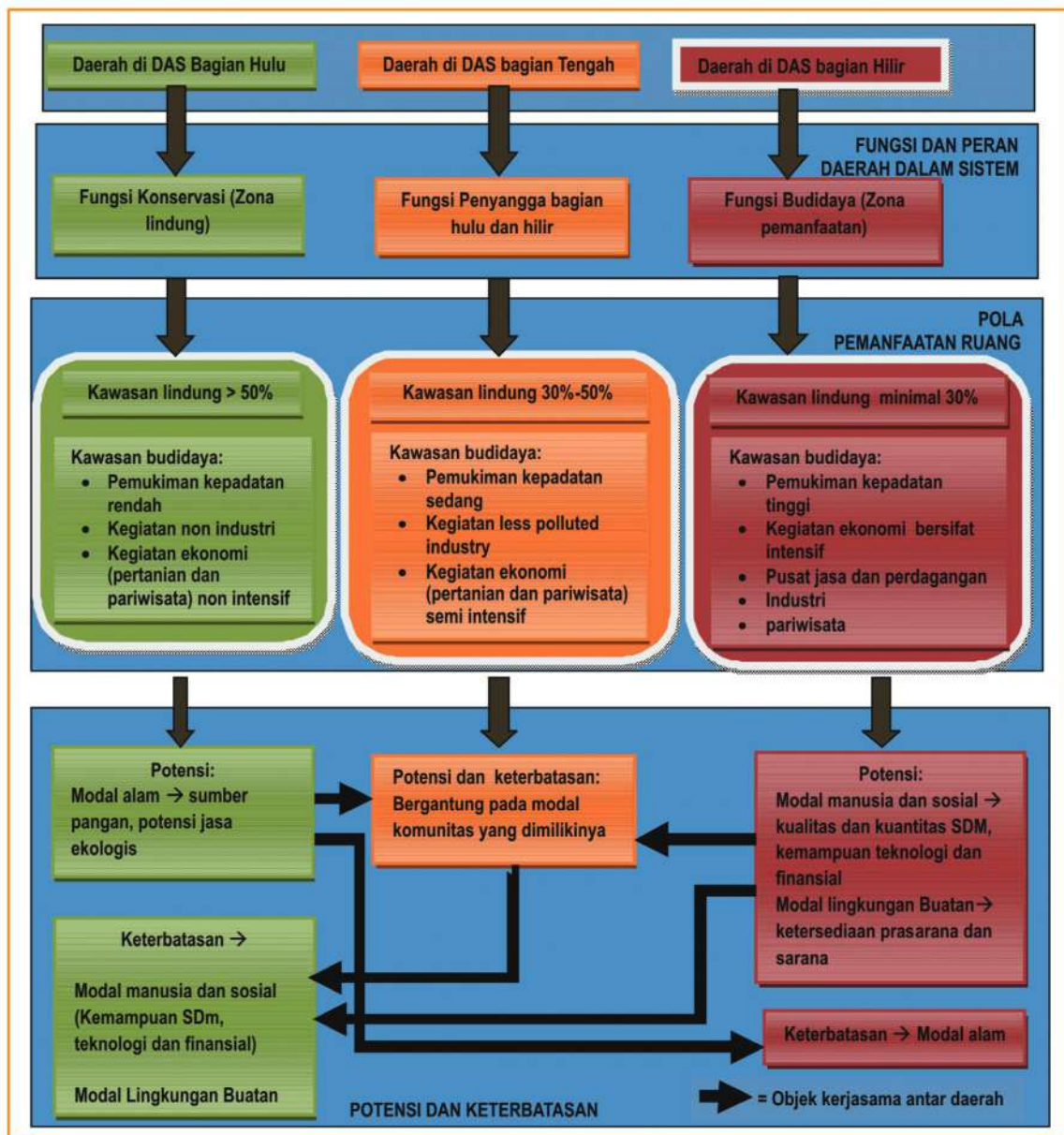
tepatan pemanfaatan ruang pada ekosistem DAS secara signifikan akan memiliki keterkaitan terhadap keberlangsungan suatu DAS. Berdasarkan karakteristik masing-masing zona DAS, Fatimah, 2009 dalam disertasinya mengusulkan pola pemanfaatan ruang pada masing-masing zona dalam sistem DAS adalah sebagai berikut :

1. Zona hulu DAS, zona hulu DAS berfungsi sebagai fungsi lindung dan oleh karenanya pemanfaatan ruangnya untuk dominasi pemanfaatan kawasan lindung. Hal membawa konsekuensi, proporsi luasan kawasan lindung di zona ini seharusnya sama atau lebih besar dibandingkan dengan luasan kawasan budidaya. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang sifatnya non-intensif yang dicirikan oleh kegiatan budidaya dengan tidak membuka lahan skala besar.
2. Zona hilir DAS, ada zona hilir yang memiliki fungsi utama budidaya, kegiatan yang diperbolehkan dapat bersifat intensif. Meskipun demikian, pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

lindung tidak dilakukan perubahan alih fungsi. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan di zona ini adalah permukiman kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan industri. Luasan kawasan lindung pada kawasan perkotaan minimal sebesar 30% yang terdiri atas RTH publik seluas minimal 20% dan RTH privat seluas minimal 10% dari luas area (Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Zona tengah DAS merupakan peralihan antara zona hulu dan hilir dan memiliki fungsi sebagai penyangga zona hulu. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan di zona penyangga adalah bersifat semi intensif seperti permukiman kepadatan sedang, perdagangan dan jasa, *less-polluted* industri, jasa dan pariwisata.

Konsep kerjasama antar daerah berdasarkan pola pemanfaatan ruang dalam sistem DAS dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3. Konsep Kerjasama Pemanfaatan Ruang Antar Daerah berbasis Potensi Lokal